



## TANTANGAN PENURUNAN JUMLAH KASUS PELANGGARAN HUKUM DAN KEAMANAN DI LAUT INDONESIA

Tugas utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 178 tentang Badan Keamanan Laut adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Tugas tersebut dilaksanakan oleh Bakamla bersama dengan instansi lain seperti Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta TNI Angkatan Laut. Luas wilayah operasi keamanan dan keselamatan Bakamla mulai dari 12 neautical mile (NM) hingga 350 NM atau mulai dari wilayah perairan teritorial hingga wilayah kontinen di perairan internasional.

Sebagai negara dengan luas wilayah perairan hingga mencapai 6,4 juta Km<sup>2</sup>, Wilayah perairan Indonesia sering menjadi lokasi bagi aktivitas kejahatan seperti illegal fishing, illegal logging, illegal unreported unregulated fishing (IUUF), penyelundupan, human trafficking hingga pelayaran tanpa izin dan dokumen. Menurut data yang bersumber dari Bakamla, ratusan kasus gangguan keamanan dan keselamatan di laut terjadi setiap tahun di wilayah perairan Indonesia sejak 2015-2022. Hingga kuartal pertama 2023, jumlah kasus gangguan keamanan dan keselamatan di laut sudah mencapai 52 kasus. Kasus tersebut didominasi oleh penyelundupan, IUUF dan human trafficking. Namun, diduga bahwa lebih banyak jumlah kasus yang tidak ditemukan atau ditindak sesuai dengan undang-undang karena keterbatasan jangkauan patroli keamanan dan sumber daya yang dimiliki oleh Bakamla.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) (2023), menyajikan fakta bahwa pada bulan Februari ini terdapat 81 kapal ikan Vietnam berada di Laut Natuna Utara.

Hingga kuartal pertama 2023, jumlah kasus gangguan keamanan dan keselamatan di laut sudah mencapai 52 kasus.

Jumlah alutsiskamla tidak bertambah selama hampir satu dekade. Justru sebaliknya berkurang satu dari 32 unsur. Jumlah tersebut relatif minim bila dibandingkan dengan luas wilayah perairan ZEE Indonesia yang mencapai 3 juta km<sup>2</sup>

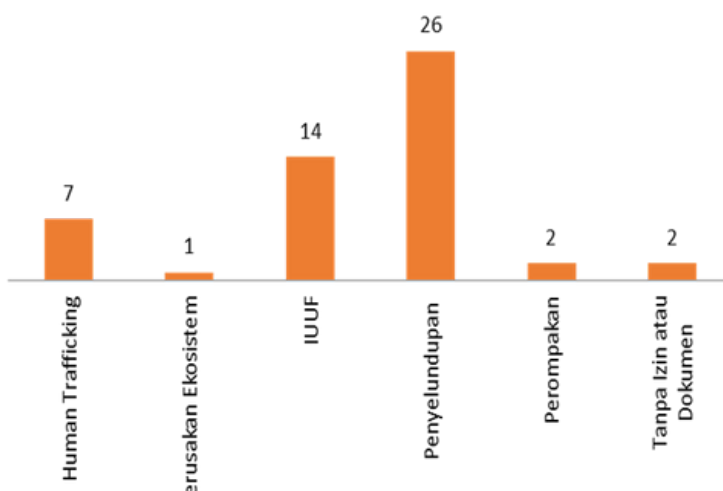
Rasio jumlah personil Bakamla relatif masih jauh dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan vietnam.

Sudah hampir satu dekade, jumlah anggaran Bakamla masih lebih dominan dialokasikan pada program yang tidak strategis

Komisi I DPR RI perlu mendorong Bakamla untuk meningkatkan kuantitas alutsiskamla, jumlah SDM yang memadai, serta mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk program peningkatan keamanan dan keselamatan

Pada bulan Maret, kehadiran jumlah kapal ikan Vietnam meningkat tajam hingga mencapai 155 unit. Namun dalam laporan Bakamla, tidak ditemukan data dan fakta sebagaimana yang disajikan oleh lembaga IOJI tersebut. Masih terdapat beberapa tantangan dalam mengamankan wilayah perairan Indonesia seperti luas wilayah perairan Indonesia yang sulit dijangkau oleh unsur alat utama sistem keamanan laut (alutsikamla) yang jumlahnya terbatas, kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang masih belum memadai hingga jumlah anggaran untuk peningkatan keamanan dan keselamatan di laut yang masih rendah.

**Gambar 1. Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan Kuartal I 2023**



Sumber: Laporan Kinerja Bakamla Semester I 2023, data diolah (2023)

## Alat Utama Sistem Keamanan Laut Relatif Tidak Bertambah

Pelanggaran hukum dan gangguan keamanan laut tidak dapat diatasi bila sarana dan prasarana pendukung tidak tersedia dengan memadai. Dibutuhkan alat utama sistem keamanan laut (alutsikamla) yang presisi dan modern. Jumlah alutsiskamla pada periode 2015-2019 hanya ditopang oleh 32 unsur yang terdiri dari: a) 1 (satu) unit Kapal Patroli 110 meter (KN Tanjung Datu), b) 3 (tiga) unit Kapal Patroli 80 meter (KN Tanjung Nipah, KN Marore dan KN Pulau Dana), c) 6 (enam) unit Kapal Patroli 48 meter (KN Belut, KN Bintang Laut, KN Kuda Laut, KN Gajah Laut, KN Singa Laut dan KN Ular Laut), d) 8 (delapan) unit Kapal Patroli 12 meter tipe Catamaran, e) 12 (dua belas) unit Kapal RHIB 9 meter, dan f) 2 (dua) unit Kapal RHIB 12 meter.

Jumlah alutsiskamla tidak bertambah selama hampir satu dekade. Justru sebaliknya berkurang satu dari 32 unsur. Alutsiskamla yang berkurang adalah satu unit Kapal RHIB karena keadaan kahar (force majeure) sehingga sudah dihapus dari daftar alutsiskamla. Dengan demikian, hingga per semester I 2023, jumlah alutsiskamla hanya tersedia 31 unsur (Laporan Kinerja Bakamla Semester I 2023). Jumlah tersebut relatif minim bila dibandingkan dengan luas wilayah perairan ZEE Indonesia yang mencapai 3 juta km<sup>2</sup>. Jika setiap unsur alutsiskamla masing-masing ditugaskan untuk mengawasi perairan, maka hanya dapat meng-cover seluas 96.774 Km<sup>2</sup>.

## Kuantitas Sumber Daya Manusia Masih Terbatas

Salah satu faktor penting dalam rangka tercapainya sasaran utama suatu program adalah sumber daya manusia. SDM aparatur keamanan laut yang memadai sangat dibutuhkan dalam upaya mengatasi pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut Indonesia. Jumlah SDM Bakamla secara keseluruhan mencapai 878 orang personelaktif selama periode 2015-2019. Pada periode 2020 hingga semester I 2023, jumlahnya meningkat menjadi 1.201 orang personil aktif. Jumlah tersebut naik sebanyak 323 orang personil atau bertambah rata-rata 80 personil setiap tahun.

Jumlah SDM Bakamla tersebut tersebar dibeberapa wilayah kerja Bakamla diantaranya: a) Markas Besar Bakamla sebanyak 494 orang, b) kantor zona maritim wilayah barat sebanyak 108 orang, c) kantor zona maritim wilayah tengah sebanyak 74 orang, d) kantor zona maritim wilayah timur sebanyak 70 orang, dan e) kapal negara sebanyak 455 orang. Hal tersebut sangat mustahil bagi Bakamla untuk dapat menindak pelanggaran hukum dan keamanan secara optimal di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

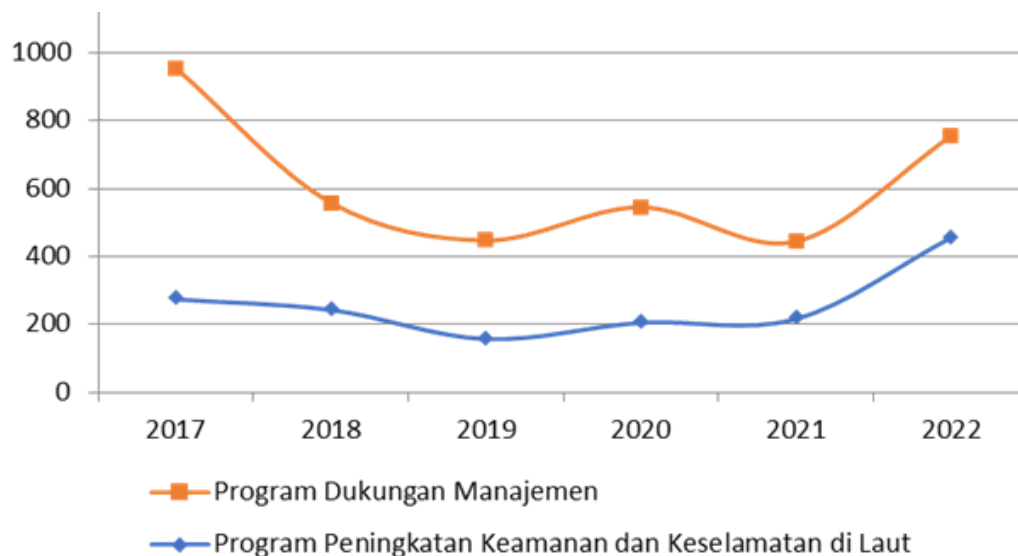


Jika dibandingkan dengan luas wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, maka rasio personil Bakamla 1:2.497. Artinya bahwa satu orang personil Bakamla diharuskan mengawasi keamanan laut radius 2.497 Km<sup>2</sup>. Hal tersebut mustahil dapat menindak kasus kejahatan di laut secara optimal. Bandingkan saja dengan beberapa negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. China memiliki jumlah personil coastguard sebanyak 16.296 personil dengan luas perairan 3,69 juta Km<sup>2</sup>. Rasio personilnya 1:266,13 Km<sup>2</sup>. Singapura dengan jumlah personil 1000 orang dan wilayah laut hanya 10,024 Km<sup>2</sup> memiliki rasio 1:0,01 Km<sup>2</sup>. Jumlah personil coastguard Malaysia 4.500 orang dengan luas wilayah laut mencapai 2.638 Km<sup>2</sup>, rasio personilnya 1:0,59 Km<sup>2</sup>. Demikian halnya dengan Vietnam, yang memiliki jumlah personil coastguard sebanyak 8.000 orang dengan luas wilayah laut mencapai 21,140 Km<sup>2</sup>, rasio personilnya 1:2,64 Km<sup>2</sup>. Rasio jumlah personil Bakamla relatif masih jauh dari negara-negara tetangga tersebut di atas.

## Anggaran Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut Relatif Masih Lebih Rendah

Program peningkatan keamanan laut bertujuan untuk mewujudkan eskalasi keamanan, keselamatan, penegakan hukum dan sistem informasi keamanan laut Indonesia. Sedangkan program dukungan manajemen hanya sebatas mengelola administrasi umum dan layanan perkantoran. Jika dilihat pada Gambar 2, sejak 2017 hingga 2022 belanja untuk program dukungan manajemen masih lebih besar dibandingkan dengan program peningkatan keamanan dan keselamatan di Laut.

**Gambar 2. Perkembangan Anggaran Bakamla Periode 2017-2022**

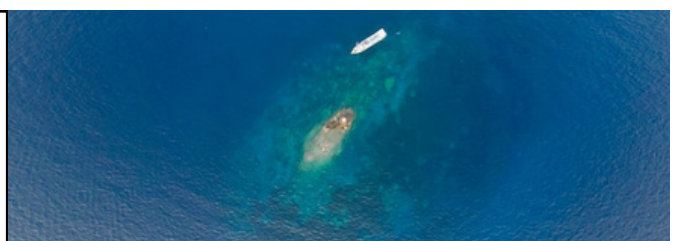


Sumber: LKPP 2017-2022 dan RKA K/L 2022, data diolah (2023)

Realisasi belanja program dukungan manajemen rata-rata Rp359,47 miliar atau 58,2 persen. Sedangkan untuk program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut rata terealisasi sebesar Rp258,22 miliar atau 41,8 persen. Seharusnya Bakamla lebih memprioritaskan belanja untuk program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut. Sudah hampir satu dekade, jumlah anggaran Bakamla masih lebih dominan dialokasikan pada program yang tidak strategis.



Belanja untuk program dukungan manajemen masih lebih besar dibandingkan dengan program peningkatan keamanan dan keselamatan di Laut.



## PENUTUP

Tantangan dalam mengamankan wilayah perairan masih kerap dihadapi oleh Indonesia, untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain: Komisi I DPR RI perlu mendorong Bakamla untuk meningkatkan kuantitas alutsiskamla secara bertahap agar unsur keamanan dan keselamatan di laut lebih presisi dan mampu mendeteksi dan menindak setiap potensi pelanggaran hukum dan gangguan keamanan pada tahun ini dan mendatang. Selain itu, dibutuhkan jumlah SDM yang memadai agar kinerja Bakamla lebih maksimal dalam mengawal perairan Indonesia sehingga rasio luas wilayah perairan berbanding jumlah SDM Bakamla turun secara bertahap. Kemudian, Komisi I DPR RI juga harus mendorong alokasi anggaran untuk program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa persentase penurunan jumlah pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia terus dapat dipertahankan dan/ atau dapat ditingkatkan setiap tahunnya.

## REFERENSI

- Bakamla. (2023). Laporan Kinerja Semester I Tahun 2023. Jakarta: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- BPK. (2015-2022). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Indonesia Ocean Justice Initiative. (2023). Deteksi dan Analisis Keamanan Laut di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia Periode Januari Hingga Maret 2023. Diakses melalui: <https://oceanjusticeinitiative.org/2023/04/30/deteksi-dan-analisis-gangguan-keamanan-laut-di-wilayah-perairan-dan-yurisdiksi-indonesia-periode-januari-hingga-maret-2023/>.
- Kemenkeu. (2022). Rencana Kerja Anggaran K/L 2022. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut. Diakses melalui: [https://www.bakamla.go.id/uploads/constitution/Perpres\\_Nomor\\_178\\_Tahun\\_2014.pdf](https://www.bakamla.go.id/uploads/constitution/Perpres_Nomor_178_Tahun_2014.pdf)



Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
Penanggungjawab : Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.  
Penyusun : Mujiburrahman, Ade Nurul Aida